



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Bupati Kabupaten Bekasi, Bupati Kabupaten Tangerang, Walikota Kota Serang dan Kepala Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 17 Juni 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Membahas / menyusun Program Kerja
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 41 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3, Bupati Kabupaten Tangerang, Walikota Kota Serang dan Kepala Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Walikota Bogor, Wakil Bupati Tangerang, Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, dan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan agenda “Membahas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Daerah” dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja para Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam merespon dampak sosial dari pandemi Covid-19 sekaligus upaya serius dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan data penerima bantuan sosial di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti aplikasi SALUR dan Jaga Asa sebagai benchmark.
2. Komisi VIII DPR RI meminta para Kepala Daerah Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, pengelolaan data kemiskinan/penerima bantuan sosial yang lebih rinci, terpilah dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
3. Komisi VIII DPR RI meminta para Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial untuk meng-*up date* data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak tumpang tindih dan tidak tepat sasaran antara bantuan sosial dan bantuan non-tunai baik dari Pusat maupun Daerah yang dialokasikan dalam APBN/APBD serta masyarakat.
4. Dalam rangka meningkatkan akurasi dan transparansi data kemiskinan, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota harus memperkuat dukungan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, anggaran untuk verifikasi dan validasi data serta jumlah maupun kualitas bantuan sosial, juga sistem informasi dan layanan data secara terpadu.
5. Pengelolaan bantuan sosial harus dilakukan secara hati-hati karena pengelolaan bantuan ini akan berimbas pada runtuhnya modal sosial berupa solidaritas dan gotong royong dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

6. Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan hanya bersifat administratif berdasarkan data kependudukan dan setelah itu diserahkan ke Pusdatin Kemensos RI. Namun setelah terjadi perubahan tidak dijelaskan daftar perubahannya sehingga Pemerintah Daerah tidak mengetahui data perubahannya. Oleh sebab itu data kemiskinan harus dibuka secara transparan dan dijadikan public assessment serta adanya standar atau indeks besaran bantuan sosial.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.